



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DESA DI DESA NAGORI PURBA DOLOK
KECAMATAN PURBA KABUPATEN SIMALUNGUN**

**Jadongan Sijabat¹, Halomoan Sihombing², Bonifasius Tambunan³, Roulina Arinaro
Sijabat⁴**

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nommensen, Medan
Email: jadongansijabat@uhn.ac.id

ABSTRAK

INFORMASI ARTIKEL

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Persepsi masyarakat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa dapat dilihat dari aspek Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Akuntabilitas, Responsibilitas. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Nagori Purba Dolok. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan atau riset yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Persepsi masyarakat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa jika dilihat dari aspek Produktivitas belum berjalan secara efektif dan efisien. Kualitas Layanan masih sangat rendah dan Akuntabilitas belum baik karena dalam pelaporan keuangan belum dilakukan secara efektif dan efisien.

INFORMASI ARTIKEL

Dikirim : 20 Juni 2022
Revisi Pertama : 29 Agustus 2022
Diterima : 26 September 2022
Tersedia online : 23 Maret 2023

Kata Kunci : *Persepsi, Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Akuntabilitas, Responsibilitas*

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tongkat strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah,karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat dari otonomi daerah. Dengan demikian desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Desa menjadi focus terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintahan sehingga sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa,sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Dalam aktivitas pemerintahan desa,akan timbulnya persepsi pada masyarakat. Pengertian persepsi masyarakat adalah cara pandang sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu yang sama dalam memberikan kesimpulan dalam suatu obyek berdasarkan pada pengetahuan,penglihatan,dan pengamatan sehingga masyarakat satu dengan yang lain menghasilkan pendapat yang berbeda walaupun obyeknya sama terhadap kinerja keuangan pemerintah. Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa dilihat dari 5 aspek: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Akuntabilitas, Responsibilitas.

KAJIAN PUSTAKA

Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tongkat strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah,karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat dari otonomi daerah. Dengan demikian desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Desa menjadi focus terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintahan sehingga sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan

kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan pandangan suatu individu yang diketahuinya serta yang dirasakannya dari individu lain. Baik dari tindakan, perkataan, dan kepribadian suatu individu tersebut. Persepsi juga berupa baik dan buruknya pandangan seseorang dalam menilai individu lain yang berinteraksi tatap muka langsung dengan individu yang dipersepsinya ataupun yang baru hanya dikenalnya selintas.

Persepsi masyarakat adalah cara pandang sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu yang sama dalam memberikan kesimpulan dalam suatu obyek berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pengamatan sehingga masyarakat satu dengan yang lain menghasilkan pendapat yang berbeda walaupun obyeknya sama.

Menurut Dwiyanto dkk dalam Penelitian Siti Munawaroh, Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa dilihat dari 5 aspek yaitu:

1. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan sangat penting dalam menjelaskan kinerja dari organisasi desa. Banyak pandangan negatif muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi desa.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat public yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

5. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Desa Nagori Purba Dolok, Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun.

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di desa Nagori Purba Dolok Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang digunakan oleh penulis adalah data yang dikumpulkan melalui kuesioner atau observasi dari masyarakat Desa Nagori Purba Dolok Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun.

Metode Analisis Data

Pengolahan data hasil penelitian ini menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan melalui perhitungan dengan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data, data yang dianalisis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan, memeriksa, menyusun serta mengklasifikasikan data yang diperoleh, sehingga memberikan keterangan mengenai gambaran umum dari masalah yang diteliti penulis pada masyarakat Desa Nagori Purba Dolok Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif lebih difokuskan selama proses penelitian lapangan. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh dengan hasil wawancara di lapangan. Pada tahap awal ini data yang dikumpulkan adalah informasi yang sudah diperoleh dari informan yang berhubungan tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.
2. Reduksi data, dimana peneliti merangkum informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber terlalu banyak dan tidak semua relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat mempermudah peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa pernyataan masyarakat terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

4. Kemudian dilakukan analisis (pembahasan) dengan cara melihat pernyataan yang telah dibuat oleh masyarakat terkait dengan bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.

5. Penarikan Kesimpulan terhadap jawaban yang telah di berikan oleh Masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kinerja Keuangan di Pemerintah Desa Nagori Purba Dolok sudah berjalan dengan baik yang dimana aparat desa dalam melaksanakan tugas serta fungsinya sudah berdasarkan pada administrasi yang baik dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, responsibilitas ini penting untuk tetap dijaga dan ditingkatkan demi terciptanya kinerja di Pemerintah Desa Nagori Purba Dolok. Responsibilitas yang baik dalam sebuah instansi ini adalah salah satu indikator dalam penilaian kinerja Pemerintah Desa Nagori Purba Dolok Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Desa Nagori Purba Dolok, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa produktivitas aparat desa Nagori Purba Dolok belum berjalan dengan baik karena masih banyak program serta pelayanan yang tidak berjalan dengan efektif dan efisien dalam Kinerja Keuangan Desa.
2. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kualitas kinerja dan layanan masih sangat rendah sehingga membuat kinerja aparat desa dalam melakukan pengelolaan keuangan dan kinerja keuangan tidak berjalan secara maksimal akibat faktor kualitas layanan yang relatif rendah.
3. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa responsivitas aparat desa sudah terbilang baik, karena aparat desa sudah mampu mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat dan sudah dapat mengetahui apa yang menjadi program prioritas.
4. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas kurang optimal disebabkan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program kegiatan keuangan desa.
5. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Nagori Purba Dolok sudah berjalan dengan baik yang dimana aparat desa dalam melaksanakan tugas serta fungsinya sudah berdasarkan pada administrasi yang baik dalam memberikan pelayanan publik.

Saran

1. Diperlukan adanya peningkatan perubahan dalam kinerja keuangan agar lebih dibuat secara efektif dan efisien.
2. Perlunya pelatihan untuk aparat desa dalam penatausahaan dan peningkatan kinerja keuangan.
3. Perlu adanya transparansi aparat Pemerintah Desa kepada masyarakat dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan membuat laporan keuangan di kantor desa.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga

- Dewi Astuti Retno et al. (2016). Faktor-faktor yang berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol 3, Nomor 4
- Fitri. (2015). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. *Jurnal Program Katalogis*, Volume 3 Nomor 11, hlm 180-192
- Kristiyanti, Mariana. (2012). Peran Indikator Kinerja Dalam Mengukur Kinerja Manajemen, *Fakultas Ekonomi Universitas AKI*, Vol 3, No 3.
- Malahika, M. Jehan. et al. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) PADA ORGANISASI PEMERINTAHAN (Studi Kasus di Desa Suwan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). Universitas Sam Ratulangi, Akuntansi.
- Moleong, J. Lexy. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua PuluhEmpat: Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawaroh, Siti. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul Pada Masa Kepemimpinan Sri Surya Widati Tahun 2010-2015, Hal 50-51
- Narbuko Cholid, H. Abu Achmadi. (2016). *Metodologi Penelitian*. Cetakan Kelimabelas: Bumi Aksara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat 5
- Simbolon, Maropen. (2008). Persepsi dan Kepribadian, Vol 2, No 1, 2008
- Supardan, Dadang. (2008). *Pengantar Ilmu Sosial*: Bumi Aksara
- Suryabrata, Sumadi. (2013). *Metodologi Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tabrani, Rusyan. (2018). *Membangun Keuangan Desa*, Cetakan Pertama. Bumi Aksara, Jakarta.
- Widodo Dj. Belly R.B, et al. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Keuangan Desa*. Jakarta